

**PENGARUH ASIMETRI KEKUATAN DAN DUKUNGAN EKSTERNAL TERHADAP
KETEGANGAN GERD DI SUNGAI NIL**

Ullifha Nouvellia Asrovie¹, Imam Fadhil Nugraha²

^{1,2}Universitas Jambi

ullifha11@gmail.com¹, imamfadhil86@gmail.com²

Abstrak

Pembangunan *Grand Ethiopian Renaissance Dam* (GERD) di Ethiopia tidak hanya menjadi proyek energi domestik. GERD juga menjadi instrumen dalam diplomasi pembangunan sekaligus penetrasi ke pasar energi regional. Penelitian ini berfokus pada pengaruh asimetri kekuatan dan keterlibatan aktor eksternal terhadap ketegangan yang muncul dalam proyek GERD. Selain itu, peran institusi regional dalam mengelola konflik terkait juga akan ikut dijelaskan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analisis berbasis studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa GERD menjadi instrumen penting dalam politik Ethiopia sekaligus memicu resistensi dari negara hilir seperti Mesir dan Sudan. Sementara itu, institusi regional seperti *Nile Basin Initiative* (NBI) memainkan peran penting dalam menengahi konflik yang terjadi. Walau demikian, NBI menghadapi tantangan legalitas dan kesenjangan kekuasaan. Penguatan kerja sama berbasis prinsip keadilan dan keberlanjutan menjadi kunci dalam meredam ketegangan dan membangun tata kelola air inklusif.

Kata Kunci: GERD, Sungai Nil, Diplomasi Pembangunan, Asimetri Kekuatan, NBI.

Abstract

The construction of the Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) in Ethiopia is not only a domestic energy project. GERD is also an instrument in development diplomacy as well as penetration into the regional energy market. This study focuses on the influence of power asymmetry and the involvement of external actors on the tensions that arise in the GERD project. In addition, the role of regional institutions in managing related conflicts will also be explained. The study uses a qualitative approach with a descriptive-analytical method based on literature studies. The results show that GERD is an important instrument in Ethiopian politics and also triggers resistance from downstream countries such as Egypt and Sudan.

Meanwhile, regional institutions such as the Nile Basin Initiative (NBI) play an important role in mediating the conflict that occurs. However, the NBI faces challenges of legality and power gaps. Strengthening cooperation based on the principles of justice and sustainability is the key to reducing tensions and building inclusive water governance.

Keywords: GERD, Nile River, Development Diplomacy, Power Asymmetry, NBI.

PENDAHULUAN

Pembangunan *Grand Ethiopian Renaissance Dam* (GERD) di hulu Sungai Nil pada tahun 2011 menimbulkan ketegangan di antara Ethiopia dan negara-negara riparian. GERD merupakan sebuah bendungan yang dibangun oleh Ethiopia sebagai pembangkit listrik demi mengatasi kekurangan energi di negaranya (Apipudin & Inayah, 2022). Worldbank mencatat hanya 55.4% dari populasi Ethiopia yang memiliki akses ke sumber listrik (World Bank, n.d.). GERD juga dimaksudkan agar dapat mengekspor listrik ke negara-negara tetangga. GERD dilaporkan dapat menampung kapasitas listrik hingga 6.000 megawat, menjadikannya pembangkit listrik terbesar di Afrika (Herdianti & Susiatiningsih, 2023). GERD yang terletak kurang lebih 20 km dari perbatasan Ethiopia-Sudan diharapkan dapat membawa pembaruan dan kemajuan ekonomi bagi Ethiopia (Apipudin & Inayah, 2022). Dengan terpenuhinya kebutuhan listrik berkat keberadaan GERD, maka kualitas hidup masyarakat akan meningkat. Selain itu, GERD akan menciptakan lapangan kerja sehingga dapat menekan angka kemiskinan.

Sungai Nil menjadi sumber air utama bagi negara-negara di sekitarnya. Cekungan Nil Timur menjadi sumber utama aliran Sungai Nil dengan menyumbang sebesar 85% aliran diukur dari perbatasan Sudan-Mesir (Basheer et al., 2024). Aliran ini kemudian dibagi di antara lima negara yang dilewatinya, dengan Mesir dan Sudan sebagai pengonsumsi aliran sungai terbesar di Nil Timur. Kelangkaan sumber air serta tingginya permintaan sering berakhir pada konflik perebutan di antara kelompok yang membutuhkan (Apipudin & Inayah, 2022). Mesir, misalnya, mengalami isu kritis terkait ketersediaan air terutama untuk sektor pertanian di negaranya (Matthews & Vivoda, 2023). Mesir menghadapi kekurangan air tahunan sekitar tujuh miliar meter kubik, dan diperkirakan akan kehabisan air pada tahun 2025 (UNICEF, 2021). Sementara itu, Sudan sebagai salah satu negara terkering juga mengalami kelangkaan air absolut. Terhitung hanya 51.8% dari populasi Sudan yang memiliki akses terhadap layanan

air minum dasar, yakni sumber air yang telah diperbaiki dan membutuhkan perjalanan 30 menit untuk didapatkan (Simonin et al., 2023). Pertumbuhan penduduk dan perubahan iklim merupakan penyebab utama dari keterbatasan air ini (Cohen, 2021).

Walaupun bendungan memberikan banyak manfaat dalam hal sosial dan ekonomi, bendungan juga membentuk kendali atas akses air sungai sehingga dapat menimbulkan konflik lintas batas. Pertumbuhan penduduk dan kemajuan ekonomi mendorong peningkatan permintaan sumber daya air, energi, dan pangan. Sehingga kompetisi antarnegara ikut meningkat di daerah aliran sungai di seluruh dunia (Basheer et al., 2024). Sengketa sumber daya air telah muncul di berbagai daerah yang mengalami tekanan, salah satunya Sungai Nil. Sengketa pemanfaatan air Sungai Nil di antara Ethiopia, Mesir, dan Sudan muncul ketika Ethiopia mengumumkan rencana pembangunan GERD (Caruso, 2022). Mesir menyuarakan kekhawatirannya dan langsung menolak pembangunan GERD karena dianggap mengancam negaranya. Mesir menganggap Ethiopia mengambil kesempatan ketika Mesir sedang tidak stabil akibat peristiwa *Arab Spring* yang melanda Timur Tengah (Apipudin & Inayah, 2022).

Permintaan Ethiopia untuk mendirikan GERD berulang kali ditolak oleh Mesir. Mesir menjadikan perjanjian era kolonial Inggris sebagai alasan penolakan ini (Apipudin & Inayah, 2022). Perjanjian yang ditandatangani di antara Mesir dan Inggris pada tahun 1929 memberikan hak eksklusif kepada Mesir atas perairan Sungai Nil. Hak ini mencakup pelarangan proyek irigasi serta pembangunan pembangkit listrik yang dapat mengurangi suplai air ke Mesir (Pemunta et al., 2021). Namun, perjanjian ini tidak mencakup negara riparian lainnya kecuali Sudan. Setelah perjanjian ini ditolak oleh Kenya, Uganda, dan Tanzania, perjanjian ini dinegosiasikan kembali sehingga terbentuk Perjanjian Air Nil tahun 1959. Perjanjian ini mengalokasikan air Nil kepada Mesir dan Sudan, serta mendukung pembangunan proyek Bendungan Tinggi Aswan (Pemunta et al., 2021). Namun, perjanjian ini juga tidak melibatkan negara hulu lainnya, termasuk Ethiopia.

Perjanjian ini dianggap merugikan bagi negara hulu yang tidak diikut sertakan ke dalam perjanjian. Ethiopia yang tidak merasa terikat atas perjanjian ini bertahan pada ketentuan *The Nile Basin Initiative* (NBI) tahun 1999. NBI merupakan mitra bagi negara hulu Sungai Nil dengan tujuan untuk menyediakan forum bagi kerjasama dan manajemen sumber air Nil (Apipudin & Inayah, 2022). Selain itu, NBI membentuk *Cooperative Framework Agreement* (CFA) demi mengganti perjanjian bilateral dan mentransformasi NBI menjadi komisi resmi.

Sejak dibentuk, NBI mengalami berbagai perselisihan akibat perbedaan posisi negara tepi berdasarkan perjanjian 1929 dan 1959 (Apipudin & Inayah, 2022).

Ketiga negara riparian memulai serangkaian negosiasi selama lebih dari satu dekade setelah pengumuman pembangunan GERD, namun berujung pada stagnansi (Attia & Saleh, 2021). Setiap negara secara konsisten menolak tercapainya resolusi pembagian air karena menganggapnya sebagai ancaman kedaulatan (Matthews & Vivoda, 2023). Mesir dan Sudan mempertahankan hak historisnya berdasarkan perjanjian 1929 dan 1959, sementara Ethiopia menolak mengakui perjanjian tersebut. Proses negosiasi ini tidak hanya didasarkan pada aspek teknik pengisian dan pengelolaan bendungan, namun juga dipengaruhi kekhawatiran akan pergeseran kekuatan geopolitik di kawasan Laut Merah dan Tanduk Afrika (Attia & Saleh, 2021). Ethiopia dapat memperkuat dominasinya dan menggeser keseimbangan kekuatan di antara negara tepi Sungai Nil, serta menantang Mesir dalam hal kepemimpinan tradisional di kawasan.

Untuk mencegah terjadinya konflik yang berlarut-larut, ketiga pihak utama kemudian menghadirkan pihak ketiga seperti Amerika Serikat dan Bank Dunia sebagai mediator (Herdianti & Susiatiningsih, 2023). Namun, upaya ini bertabrakan dengan kepentingan geopolitik dan kurangnya kepercayaan antar negara (Matthews & Vivoda, 2023). Berdasarkan hal ini, tulisan ini akan menjelaskan lebih lanjut bagaimana asimetri kekuatan di antara ketiga pihak serta dukungan eksternal dapat memengaruhi konflik yang muncul dari GERD. Ketegangan yang terus berlanjut ini menunjukkan kompleksitas sengketa GERD terkait akses air, dinamika kekuatan, hingga geopolitik kawasan. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam untuk memahami bagaimana asimetri kekuatan dan dukungan eksternal membentuk ancaman keamanan regional, sekaligus mengeksplorasi potensi kerja sama lintas batas guna mencegah eskalasi konflik.

TINJAUAN PUSTAKA

Pembangunan GERD telah memicu berbagai respon dari negara yang terdampak. Sungai nil telah menjadi sumber daya air utama bagi banyak negara di Afrika, sehingga menjadikannya faktor penting dalam hubungan antarnegara terutama jika pengelolaannya tidak di atur secara adil. Ketegangan terkait pengelolaan air lintas negara ini telah menimbulkan persoalan terkait kepentingan politik, keamanan, dan pembangunan. Utuk memahami dinamika konflik dan kerja

sama terkait GERD, penulis melakukan kajian literatur terhadap beberapa penelitian yang membahas isu hidropolitik, keamanan manusia, serta peran institusi regional dalam penyelesaian sengketa sumber daya air.

Apipudin dan Inayah (2022) mengkaji dinamika konflik air lintas negara dengan berfokus pada konflik Mesir-Ethiopia dalam penelitian terkait pembangunan GERD (Apipudin & Inayah, 2022). Secara konseptual, artikel ini menggunakan dua kerangka teori utama, yakni interaksi konflik hidropolitik dan teori kelangkaan air. Penelitian ini menyoroti Sungai Nil sebagai sumber daya air utama bagi 11 negara yang dilintasinya. Konflik air muncul akibat adanya ketidakseimbangan dalam pemanfaatan Sungai Nil, terutama di antara Ethiopia dan Mesir. Ketegangan antara Mesir dan Ethiopia telah terpicu sejak 2011. Ini terjadi terutama karena Mesir menganggap pembangunan GERD dapat mengancam ketahanan sumber daya air yang berasal dari Sungai Nil. Ketegangan kemudian meningkat ketika pengisian bendungan dimulai dan memicu protes Mesir ke Dewan Keamanan PBB. Ditegaskan bahwa konflik GERD telah mengancam keamanan nasional dan regional (Apipudin & Inayah, 2022). Lebih lanjut, terdapat upaya diplomatik yang telah dilakukan, seperti pembentukan *International Panel of Experts* (IPoE), *Tripartite National Committee*, serta penandatanganan *Declaration of Principles* (DoP) tahun 2015. Namun, negosiasi ini gagal dalam menghasilkan kesepakatan karena perbedaan pandangan antara kedua negara. Selain itu, penyebab konflik ini bukan hanya dikarenakan masalah teknis atau ekologis, tapi juga penuh dengan masalah geopolitik dan sejarah kolonial (Apipudin & Inayah, 2022). Dari perspektif neoliberalisme, kegagalan upaya diplomatik yang terjadi menunjukkan lemahnya institusi lintas negara dalam mengatasi asimetri kekuatan yang ada. Meskipun IPoE dan DoP telah memfasilitasi kerja sama, kurangnya rasa percaya antar negara serta ketimpangan kekuasaan akhirnya menghambat terbentuknya rezim pengelolaan air yang inklusif.

Pemunta et al. (2021) menjelaskan konflik geopolitik dan keamanan yang muncul akibat pembangunan GERD (Pemunta et al., 2021). GERD dianggap sebagai ancaman langsung terhadap keamanan nasional Mesir dikarenakan ketergantungan mereka yang besar kepada Sungai Nil. Krisis air dapat berpengaruh secara langsung kepada keamanan manusia, baik dalam hal pangan dan kesehatan. Artikel ini menggunakan pendekatan *human security* dan menekankan air sebagai hak dasar manusia, serta menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas negara. Perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, serta kelangkaan air

berpotensi memunculkan konflik dan krisis kemanusiaan antar negara. Kekhawatiran Mesir akan hal ini membuat mereka mempertimbangkan penggunaan militer serta melakukan tekanan diplomatik dan ekonomi demi menghentikan pembangunannya (Pemunta et al., 2021). Selain itu, muncul investor seperti Cina, India, Qatar, dan UEA untuk GERD Ethiopia (Pemunta et al., 2021). Kehadiran investor ini memperkuat posisi Ethiopia baik secara ekonomi maupun politik, dan melemahkan dominasi Mesir secara historis. Pendanaan yang diberikan investor menggantikan ketergantungan Ethiopia kepada Bank Dunia maupun *African Development Bank*, di mana keduanya tidak mendukung proyek GERD tanpa persetujuan Mesir.

Dalam kerangka neoliberalisme, keterlibatan investor eksternal membuat dinamika kerja sama lintas negara menjadi lebih rumit. Ini dikarenakan dukungan eksternal yang memperkuat masalah asimetri kekuatan, dalam hal ini Ethiopia yang menerima sumber daya ekonomi dan ketergantungan Mesir pada aliansi AS dan negara Teluk. NBI dapat meredakan ketegangan dengan menciptakan pembagian manfaat antarnegara, namun ketergantungan pada aktor eksternal dapat mengurangi otonomi institusi regional. Sehingga hal ini dapat menghambat pembentukan kerja sama berkelanjutan.

Purnomo (2020) melalui tulisannya menjelaskan penyelesaian konflik sumber daya air lintas negara secara damai dan kolektif melalui konsep *hydrosolidarity* di dalam NBI (Purnomo, 2022). Kerjasama transnasional menjadi poin penting untuk membentuk strategi dalam membangun perdamaian. NBI merupakan organisasi regional yang terbentuk pada tahun 1999 dengan anggota yakni negara riparian Sungai Nil (Purnomo, 2022). NBI dianggap sebagai forum damai yang berusaha menengahi kesenjangan di antara negara hulu dan negara hilir. Walaupun NBI memberikan banyak inisiatif yang konstruktif, ketimpangan kekuasaan antarnegara tetap menjadi penghalang besar. Selain itu, kurangnya kerangka hukum dan ketergantungan pada pihak eksternal juga menjadi tantangan besar bagi NBI (Purnomo, 2022). Sehingga, tetap dibutuhkan komitmen politik dari negara anggotanya walaupun NBI telah menjadi forum yang strategis dalam mempromosikan kerjasama damai.

Sengketa GERD menunjukkan tantangan yang kompleks dalam mengelola sumber daya air lintas negara, terutama karena diperburuk oleh asimetri kekuatan dan kemunculan dukungan eksternal yang mengancam keamanan regional. Dari sudut pandang neoliberalisme, konflik ini menyoroti pentingnya institusi regional seperti NBI dalam memfasilitasi kerja sama transnasional. Walaupun upaya seperti IPoE dan DoP berpotensi dalam menjembatani

kesenjangan di antara Mesir, Sudan, dan Ethiopia, keberhasilannya tetap terhambat akibat asimetri kekuatan dan pengaruh dukungan eksternal. Artikel ini akan mengisi celah penelitian dengan menganalisa penguatan institusi regional dapat mengurangi ancaman keamanan yang muncul dikarenakan GERD. NBI memiliki peluang mengubah konflik GERD menjadi pembangunan berkelanjutan, terlebih karena GERD memiliki potensi besar dalam pasar global. Sehingga diharapkan munculnya stabilitas dan keadilan dalam pengelolaan sungai nil.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan berfokus pada analisis pengaruh terhadap keamanan. Data yang digunakan berupa artikel jurnal terdahulu, dokumen resmi, serta laporan media terkait pengaruh asimetri kekuatan dan dukungan eksternal terhadap ketegangan GERD di Sungai Nil. Data yang diperoleh dianalisis secara tematis untuk menemukan pola ancaman keamanan secara menyeluruh dan mendalam. Data akan diuraikan dalam bentuk naratif agar memberikan pemahaman menyeluruh mengenai pengaruh asimetri kekuatan dan dukungan eksternal terhadap ketegangan GERD di Sungai Nil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. GERD sebagai Pasar Global dan Diplomasi Pembangunan

Ethiopia tidak hanya menunjukkan usaha dalam memenuhi kebutuhan energi nasionalnya, namun juga dalam strategi diplomasi pembangunan dan penerobosan pasar energi regional dengan menjadikan GERD sebagai instrumen penting. GERD telah mentransformasi Ethiopia menjadi aktor penting dalam tatanan geopolitik dan geoekonomi di kawasan Afrika Timur. Di samping itu, GERD tidak hanya dirancang untuk memenuhi kebutuhan domestiknya. Dengan kapasitas sebesar 6.000 megawat, bendungan ini diharapkan dapat mengekspor listrik ke negara tetangga seperti Kenya, Sudan, dan Djibouti melalui kerangka *Eastern Africa Power Pool* (EAPP) (Matthews & Vivoda, 2023). Langkah ini menjadikan GERD sebagai proyek energi yang strategis bagi pembangunan ekonomi dan diplomasi energi Ethiopia. Proyek GERD telah menunjukkan langkah Ethiopia yang memusatkan dirinya sebagai pusat distribusi energi di kawasannya, sekaligus berusaha memperkuat ketergantungan energi negara tetangga.

Ethiopia mempertegas posisinya sebagai negara yang mampu menghadapi tekanan geopolitik dari negara hilir secara independen. Hal ini ditunjukkan melalui pendanaan GERD

yang dilakukan secara mandiri melalui sumbangan masyarakat tanpa menerima bantuan dan pinjaman asing (Apipudin & Inayah, 2022). Ethiopia secara eksplisit menunjukkan penolakan pada bantuan pendanaan dari Mesir dan Bank Dunia agar memiliki kontrol penuh atas proyek GERD ini (Matthews & Vivoda, 2023). Dalam pelaksanaannya, Ethiopia kemudian menerima dukungan Tiongkok dalam pengadaan peralatan pembangkit listrik dan pembangunan jaringan transmisi energi (Matthews & Vivoda, 2023). Hal ini menunjukkan tindakan Ethiopia dalam menerapkan diplomasi pembangunan yang menolak ketergantungan pada negara barat dan memilih untuk membangun kemitraan bersama kekuatan ekonomi global non-barat.

Di samping Tiongkok, beberapa aktor eksternal lain juga ikut berperan penting dalam proyek GERD. Aktor eksternal ini di antaranya adalah India, Qatar, dan UEA (Pemunta et al., 2021). Kontribusi mereka umumnya berkaitan dengan investasi di sektor agraria dan industri energi yang menyokong pembangunan bendungan. Mereka masuk melalui skema pengalihan lahan dan dukungan pembangunan, sehingga memperkuat koneksi antara proyek GERD dan kepentingan ekonomi eksternal (Pemunta et al., 2021). Aktor eksternal ini turut mempengaruhi dinamika geopolitik kawasan dikarenakan kepentingan politik dan ekonomi (termasuk negosiasi hak air dan keamanan energi) yang dibawanya (Pemunta et al., 2021). Akibatnya, GERD menjadi alasan masuknya diplomasi ekonomi negara non-Afrika di kawasan Afrika Timur. Sehingga tercipta dinamika kekuasaan baru di antara negara hulu dan hilir Sungai Nil.

GERD menjadi titik balik kebangkitan ekonomi Ethiopia. Sebelum GERD dibangun, tercatat hanya 60% penduduk Ethiopia yang mendapatkan akses ke sumber listrik (Matthews & Vivoda, 2023). Selain itu, Worldbank juga mencatat sekitar 55.4% dari populasi Ethiopia yang memiliki akses ke sumber listrik per tahun 2023 (World Bank, n.d.). Dengan terpenuhinya kebutuhan listrik berkat keberadaan GERD, maka kualitas hidup masyarakat akan meningkat. Selain itu, GERD akan menciptakan lapangan kerja sehingga dapat menekan angka kemiskinan.

Namun, pembangunan GERD ini menimbulkan kekhawatiran dan ketegangan di antara negara hilir yang bergantung pada aliran air Sungai Nil, yakni Mesir dan Sudan. Terlebih, Mesir telah lama mempertahankan statusnya sebagai pemegang hak eksklusif melalui perjanjian 1929 dan 1959 (Matthews & Vivoda, 2023; Pemunta et al., 2021). Ethiopia menolak perjanjian tersebut dengan alasan ketidakadilan historis dan menantang tata kelola air melalui GERD. Lebih lanjut, ketimpangan akses air turut memperparah krisis kemanusiaan di negara hilir. Mesir diprediksi akan mengalami kelangkaan air absolut pada tahun 2025 (UNICEF, 2021). Krisis ini

terutama akan berdampak besar bagi kelompok rentan yang semakin terpapar resiko air tak layak konsumsi. Sementara itu, *Drinking Water Security Index (DWSI)* Sudan, terutama di wilayah Sungai Nil dan Laut Merah, sangat rendah dan dapat berdampak pada Kesehatan ibu dan bayi (Simonin et al., 2023). Kerentanan air di wilayah tersebut dapat meningkat hingga 60% pada tahun 2030 jika tidak dilakukan intervensi (Simonin et al., 2023).

Berbagai upaya mediasi internasional dikerahkan demi menengahi ketegangan yang terjadi di antara negara-negara kawasan, termasuk oleh AS dan Bank Dunia. Namun, proses negosiasi yang difasilitasi AS dalam *Washington Round* mengalami kegagalan (Herdianti & Susiatiningsih, 2023). Hal ini dikarenakan Ethiopia memutuskan untuk meninggalkan perundingan karena menganggap proses yang terjadi memihak Mesir (Herdianti & Susiatiningsih, 2023). Ini menunjukkan bahwa kehadiran aktor eksternal tidak selalu mampu berkontribusi pada penyelesaian konflik. Sebaliknya, kehadiran mereka dapat menjadi pemicu bagi kecurigaan dan ketidakpercayaan di antara negara yang berkonflik.

Dalam konteks diplomasi global, GERD menjadi alat bagi Ethiopia dalam membentuk citra internasionalnya sebagai negara dengan visi pembangunan jangka panjang yang tidak tunduk pada kekuatan eksternal. Melalui laporan GIGA, diketahui bahwa kawasan sekitar GERD menjadi titik strategis bagi kekuatan global yang memiliki kepentingan (Attia & Saleh, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa GERD bukan lagi hanya merupakan isu geostrategis yang berpusat pada permasalahan distribusi air. Selain itu, GERD menunjukkan transisi dalam penggunaan infrastruktur sebagai instrumen *soft power*. GERD tidak hanya menjadi proyek peningkatan kesejahteraan masyarakat, tapi juga menjadi alat negosiasi diplomatik yang memperkuat posisi tawarnya di dunia internasional. Ethiopia juga menunjukkan kedaulatannya dengan melakukan pengisian waduk secara sepihak ketika negosiasi teknis yang terjadi belum selesai (Pemunta et al., 2021).

Negara teluk seperti Qatar dan UEA menunjukkan dukungannya melalui skema investasi pertanian dan energi di wilayah sekitar bendungan (Pemunta et al., 2021). Ini termasuk melalui skema pengalihan lahan yang dilakukan secara bilateral. Masuknya investasi ini memperkuat posisi Ethiopia sebagai pasar potensial dan mitra pembangunan. Di samping itu, ini juga sekaligus meningkatkan daya tawar Ethiopia dalam isu keamanan energi dan pangan. Ethiopia mengintegrasikan proyek GERD dengan tujuan jangka panjang di sektor industrialisasi dan ekspansi jaringan listrik (Matthews & Vivoda, 2023). Tindakan ini menjadikan GERD sebagai

hub pembangunan regional yang penting.

GERD menjadi contoh dalam melihat bagaimana infrastruktur dapat dijadikan alat instrumen diplomasi pembangunan sekaligus memberikan dampak besar dalam pasar. Ethiopia telah menempatkan proyek ini sebagai simbol kedaulatan, pembangunan nasional, serta alat diplomasi dan negosiasi. Masuknya aktor eksternal dan meningkatnya kepentingan ekonomi-politik lintas negara menjadikan GERD sebagai pusat persaingan geopolitik dan geoekonomi yang menentukan dinamika kekuasaan di kawasan Afrika Timur. Dalam konteks ini, diplomasi pembangunan Ethiopia tidak hanya menunjukkan upaya penyediaan listrik melalui GERD, tapi juga proses negosiasi ulang terhadap struktur kekuasaan historis di kawasan Sungai Nil. Peran aktor eksternal, baik investor maupun mediator, mengindikasikan bahwa isu air semakin terhubung dengan kompetisi kekuatan global. GERD kemudian menjadi contoh nyata bagi isu keamanan air dan kerjasama transnasional di Afrika Timur.

b. Institusi Regional sebagai Wadah Kerja Sama

1. Sengketa GERD menekankan kembali pentingnya institusi regional dalam pengelolaan konflik sumber daya lintas batas. Dalam hal ini, konflik yang terjalin berada di kawasan Sungai Nil yang melewati sebelas negara di kawasan Afrika. Salah satu institusi yang paling menonjol di wilayah Nil adalah NBI. NBI didirikan pada tahun 1999 oleh sembilan negara wilayah aliran Sungai Nil (Purnomo, 2022). NBI menjadi institusi yang berfokus dalam mempromosikan *hydrosolidarity* atau solidaritas air lintas negara di antara negara-negara wilayah Sungai Nil (Purnomo, 2022). Institusi regional ini bertujuan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya air secara kolektif dan berkelanjutan (Alemayehu, 2024).
2. NBI menjadi institusi pertama yang berhasil mengumpulkan hampir seluruh negara riparian dalam satu forum dialog dan kordinasi bersama. Institusi ini menyediakan wadah dalam berbagi informasi, perancangan proyek kolaboratif, dan pengembangan prinsip tata kelola air inklusif (Alemayehu, 2024). Salah satu rancangan penting yang telah disusun NBI adalah *Nile Basin Trust Fund* (NBTF), yang berfungsi sebagai mekanisme pendanaan bersama untuk proyek lintas negara. Kapabilitas NBI lalu diperkuat dengan adanya dukungan finansial dan teknis dari mitra internasional seperti Bank Dunia dan UNDP (Alemayehu, 2024).
3. Walau demikian, NBI menghadapi berbagai tantangan signifikan. Salah satunya terkait

Cooperative Framework Agreement (CFA) yang dirancang sebagai dasar hukum pengelolaan air Sungai Nil. Mesir dan Sudan yang keberatan dengan dihapuskannya hak veto negara hilir kemudian menolak untuk menandatangani CFA (Tekuya, 2007). Hal ini berakibat pada hilangnya kekuatan mengikat CFA bagi seluruh negara kawasan serta dinilai gagal dalam menjembatani perbedaan kepentingan. CFA yang seharusnya menjadi landasan hukum kooperatif malah menunjukkan perbedaan paradigma antara negara hulu yang berpegang pada asas keadilan distributif dan negara hilir yang berpegang pada hak historis. Lebih lanjut, posisi hegemonik Mesir dalam sejarah pengelolaan Nil menjadi hambatan besar. Mesir masih terus merujuk pada perjanjian kolonial tahun 1929 dan 1959 untuk mempertahankan kontrolnya atas aliran air Sungai Nil. Sementara itu, negara hulu terus menuntut keadilan dalam distribusi sumber daya air (Alemayehu, 2024). Ketegangan ini menunjukkan kondisi tarik menarik antara pendekatan legalistik dan pendekatan kolaboratif solidaritas. Pendekatan Mesir menekankan model *hydro-hegemony* berupa instrumen hukum, diplomasi, bahkan ancaman kekuatan dalam mempertahankan kepentingannya.

4. *Hydrosolidarity* muncul sebagai pendekatan alternatif dalam mendorong kerjasama antar negara dengan mendorong ketergantungan ekologis dan tanggung jawab bersama. Pendekatan ini menentang fokus atas hak air dan mengedepankan kerjasama pengelolaan air demi keberlanjutan jangka panjang (Purnomo, 2022). Walaupun masih bersifat normatif, *hydrosolidarity* menawarkan kerangka kerja yang dapat memperkuat legitimasi kerjasama regional. Sebagai contoh, dalam inisiatif serupa di kawasan lain, *Mekong River Commission* (MRC) dan *International Commission for the Protection of the Danube River* (ICPDR) muncul dengan prinsip transparansi data, pengawasan bersama, dan koordinasi kebijakan (Deribe et al., 2024). Prinsip-prinsip ini terbukti dapat meningkatkan kepercayaan antarnegara. Apabila prinsip serupa dapat diadopsi oleh NBI, besar kemungkinan upaya mitigasi konflik seperti GERD untuk memperoleh landasan konstitusional yang lebih kuat.
5. NBI perlu memperluas mandatnya sehingga menjadi wadah hukum yang mengikat dengan mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas demi meningkatkan efektivitasnya. NBI juga perlu membentuk prinsip tata kelola yang dapat disepakati bersama. Tanpa adanya kedua hal tersebut, maka kerjasama regional akan beresiko terus terhambat persaingan geopolitik

dan ketimpangan kekuasaan yang ada. NBI perlu mengambil langkah tegas seperti penetapan indikator berkelanjutan, kewajiban pertukaran data hidrologi terbuka, serta penyusunan kerangka kerja mitigasi proyek besar demi mendorong kepercayaan antarnegara. Di samping itu, peran masyarakat sipil dan aktor non-negara juga menjadi penting dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi mereka dapat memastikan bahwa kepentingan masyarakat, terutama yang terdampak dalam proyek besar, terakomodasi dalam skema kerja sama.

Meskipun NBI dan CFA belum sepenuhnya berhasil dalam menyelesaikan konflik di kawasan Sungai Nil, keberadaannya masih tetap penting sebagai fondasi awal kerja sama. Penyempurnaan kelembagaan, peningkatan komitmen politik, serta adopsi pendekatan seperti *hydrosolidarity* dan praktik transparansi dapat menjadi jalan keluar dari konflik menuju kerja sama pengelolaan air. Dalam jangka panjang, NBI dapat menjadi lembaga penting untuk menghindari eskalasi konflik sekaligus membangun ketahanan regional dalam menghadapi perubahan iklim yang terus meningkat.

KESIMPULAN

Pembangun GERD menunjukkan bagaimana infrastruktur dapat bertransformasi menjadi alat diplomasi pembangunan sekaligus distributor energi. Hal ini menjadikan GERD sebagai instrumen penting dalam negosiasi perubahan struktur kekuasaan regional. Proyek ini memperlihatkan kemampuan negara hulu dalam membangun posisi tawarnya melalui pemanfaatan sumber daya domestik dan kerja sama dengan aktor eksternal non-barat. Di sisi lain, GERD memicu ketegangan serius dengan negara hilir yang terus mempertahankan klaim historisnya atas aliran Sungai Nil. Perbedaan kepentingan yang ada merepresentasikan kompleksitas tata kelola air di kawasan Afrika Timur. Infrastruktur tidak menjadi sekadar pemenuh kebutuhan teknis, tapi sekaligus menjadi simbol kedaulatan dan medan kompetisi geopolitik. Ethiopia membuktikan kapasitas domestiknya dan memperkuat peran internasionalnya dalam pasar energi regional melalui GERD.

Dengan berbagai ketegangan yang ada, NBI muncul sebagai institusi regional penting yang mewadahi kerja sama transnasional yang berkelanjutan. Meskipun belum sepenuhnya efektif, keberadaan NBI menunjukkan potensi transformasi dari pendekatan unilateralisme menuju multilateralisme berbasis prinsip keadilan dan keberlanjutan. Tantangan seperti

penolakan terhadap CFA, ketimpangan kekuasaan, dan model *hydro-hegemony* negara hilir menjadi hambatan serius. Pendekatan baru seperti *hydrosolidarity*, peningkatan kapasitas lembaga, dan partisipasi aktor non-negara dapat membuka jalan bagi pembentukan sistem pengelolaan air yang inklusif. Dalam hal ini, GERD dan NBI menjadi gambaran dari upaya kolektif negara kawasan untuk mengarahkan dinamika antara kedaulatan nasional dan kebutuhan kerja sama regional dalam menghadapi tantangan masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alemayehu, A. (2024). Conflicts and Treaty over the Nile Basin. A Critical Review. *East African Journal of Environment and Natural Resources*, 7(1), 1–16. <https://doi.org/10.37284/eajenr.7.1.1673>
- Apipudin, A., & Inayah, A. F. (2022). Konflik Hidropolitik Sungai Nil antara Mesir dan Ethiopia. *Multikultura*, 1(3). <https://doi.org/10.7454/multikultura.v1i3.1111>
- Attia, H., & Saleh, M. (2021). The Political Deadlock on the Grand Ethiopian Renaissance Dam. *German Institute of Global and Area Studies (GIGA)*, 4. <http://www.jstor.org/stable/resrep33478>
- Basheer, M., Siddig, K., Elnour, Z., Ahmed, M., & Ringler, C. (2024). Toward integrated dam assessment: evaluating multi-dimensional impacts of the Grand Ethiopian Renaissance Dam on Sudan. *Environmental Research Letters*, 19(10), 104067. <https://doi.org/10.1088/1748-9326/ad7744>
- Caruso, F. (2022). Ethiopia ' s Grand Renaissance Dam. The Law , History , Politics and Geopolitics behind Africa ' s Largest Hydropower Project. *Istituto Affari Internazionali (IAI)*, May. <http://www.jstor.org/stable/resrep45729>
- Cohen, Y. (2021). Egypt has a water problem—and no, it's not only the GERD. *Atlantic Council*. <https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/egypt-has-a-water-problem-and-no-its-not-only-the-gerd/>
- Deribe, M. M., Melesse, A. M., Kidanewold, B. B., Dinar, S., & Anderson, E. P. (2024). Assessing International Transboundary Water Management Practices to Extract Contextual Lessons for the Nile River Basin. *Water*, 16(14), 1–19. <https://doi.org/10.3390/w16141960>
- Herdianti, B. N., & Susiatiningsih, R. H. (2023). Sebuah Ironi: Kegagalan Amerika Serikat dan

- Bank Dunia dalam Upaya Menyelesaikan Konflik Bendungan GERD. *Jurnal Hubungan Internasional*, 16(2), 304–322. <https://doi.org/10.20473/jhi.v16i2.49712>
- Matthews, R., & Vivoda, V. (2023). ‘Water Wars’: strategic implications of the grand Ethiopian Renaissance Dam. *Conflict, Security and Development*, 23(4), 333–366. <https://doi.org/10.1080/14678802.2023.2257137>
- Pemunta, N. V., Ngo, N. V., Djomo, C. R. F., Mutola, S., Seember, J. A., Mbong, G. A., & Forkim, E. A. (2021). The Grand Ethiopian Renaissance Dam, Egyptian National Security, and human and food security in the Nile River Basin. *Cogent Social Sciences*, 7(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2021.1875598>
- Purnomo, M. A. (2022). Hydrosolidarity di Sungai Nil: Peran Nile Basin Initiative dalam Manajemen Sungai Lintas Batas. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 18(1), 55–73. <https://doi.org/10.26593/jihi.v18i1.4362.55-73>
- Simonin, V., Vaghefi, S. A., Abdelgadir, Z. M., Eltayeb, D., Sidahmed, M. A. M., Monet, J. P., & Ray, N. (2023). Present and Future Drinking Water Security and Its Impacts on Maternities: A Multi-Scale Assessment of Sudan. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(3). <https://doi.org/10.3390/ijerph20032204>
- Tekuya, M. E. (2007). THE EGYPTIAN HYDRO-HEGEMONY IN THE NILE BASIN: THE QUEST FOR CHANGING THE STATUS QUO. *THE JOURNAL OF WATER LAW*, 26(2), 199–201. <https://ssrn.com/abstract=3680312>
- UNICEF. (2021). *Water Scarcity in Egypt: GROWING CONCERNS, AND PARTNERSHIPS*. [https://www.unicef.org/egypt/media/7986/file/Water Scarcity in Egypt.pdf](https://www.unicef.org/egypt/media/7986/file/Water%20Scarcity%20in%20Egypt.pdf)
- World Bank. (n.d.). *Access to electricity (% of population) - Ethiopia | Data*. Retrieved May 2, 2025, from <https://data.worldbank.org/indicator/EG.ELC.ACCS.ZS?end=2023&locations=ET&start=2020&type=points&view=chart>